

Prisma

Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Mengundang
Kudeta Militer

Media dalam Perubahan Zaman



LP3ES



Volume 34, 2015

1



Prisma diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan ekonomi, perkembangan sosial dan perubahan kultural di Indonesia dan sekitarnya. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, sarjana, praktisi dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Prisma tidak selalu segaris atau mencerminkan pendapat LP3ES. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Dilarang mengutip, menerjemahkan, dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi. © Hak cipta dilindungi Undang-undang.

TOPIK KITA

<i>Daniel Dhakidae</i>	2	Kabar, Surat Kabar, Gunjing, dan Media Sosial
<i>Ashadi Siregar</i>	3	Ruang Publik Patologis: Media dan Sukses Kepemimpinan Nasional 2014
<i>Fachri Muhammad</i>	13	Media Radio: Redup Secara Bisnis, Tak Tergantikan Secara Sosial
<i>Fransiskus Surdiasis</i>	23	Stagnasi Bisnis Media Massa Cetak dan Jalan Keluarnya
<i>Agus Sudibyo</i>	33	Pilihan-pilihan Etis dalam Ranah Kebebasan Pers
<i>Ignatius Haryanto</i>	45	Menimbang Ulang Kekuatan Pemilik Media dalam Arena Politik Indonesia

ESAI

<i>Fachru Nofrian Bakarudin</i>	58	"Homo Informaticus" versus "Homo Oeconomicus"
---------------------------------	----	---

DIALOG

<i>Jakob Oetama</i>	62	Media Digital: Bukan Ancaman Tetapi Mitra Menuju Perubahan
---------------------	----	--

SURVEI

<i>Abdul Firman Ashaf</i>	71	Jurnalis Perempuan: Patuh atau Melawan?
---------------------------	----	---

ARTIKEL

<i>Gregorius Soetomo</i>	83	Membaca "Jaringan Ulama": Kritik Historiografis Berdasarkan Filsafat Sejarah Hegel
<i>Salim Said</i>	98	Mengundang Keterlibatan Angkatan Bersenjata: Catatan dari Mesir dan Thailand

BUKU

<i>Imam Shofwan</i>	119	Banjir Informasi: Haruskah Kita Tenggelam?
<i>Budiawan</i>	124	Budaya Layar dan Politik Identitas

132 PARA PENULIS

Vol. 34, No. 2, 2015: *Kedaulatan Pangan*
Vol. 35, No. 1, 2016: *Pembangunan Berkelanjutan*

Gambar sampul & vignette: GM Sudarta

Pendiri: Ismid Hadad, Nono Anwar Makarim • Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Daniel Dhakidae • Direktur Bisnis & Pengembangan: Elya G Muskitta • Dewan Redaksi: A Tony Prasetyantono, Azyumardi Azra, Jaleswari Pramodhawardani, Kamala Chandrakirana, Satrio B Joedono, Sumit Mandal (Jerman), Taufik Abdullah, Vedi R Hadiz (Australia) • Redaktur Pelaksana Jurnal & Portal: Harry Wibowo • Redaktur Ekonomi: Fachru Nofrian Bakarudin • Redaksi: E Dwi Arya Wisesa, Nezar Patria, Rahadi T Wiratama • Sekretariat & Produksi: Awan Dewangga • Teknologi Informasi & Marketing: Christiawan Budl S

Alamat: LP3ES, Jalan Pejaten Barat Raya No. 13, Jakarta 12510, Indonesia. Telp/Faks: (6221) 71793635
Email: prisma@prismajurnal.com; prisma.redaksi@gmail.com; Website: www.prismajurnal.com; www.prismaresource.com
Bank: MANDIRI, KCP RSKD, Jakarta. Nomor Rekening: 117-000-800-046-5 a/n Prisma

ABDUL FIRMAN ASHAF

Universitas Lampung

Jurnalis Perempuan: Patuh atau Melawan?

Fokus tulisan ini adalah praktik sosial jurnalis perempuan di Provinsi Lampung, terutama pola relasi yang terbentuk ketika jurnalis perempuan melakukan aktivisme media. Sebagai bagian dari praktik sosial, aktivisme media juga berada dan dikonstruksi dalam ruang ketegangan antara hegemoni dan resistansi. Pola-pola yang selama ini terbangun, secara umum menggambarkan bahwa dengan kian melemahnya hegemoni patriarki dan menguatnya resistansi sebagai bentuk aktivisme media, praksis sosial jurnalis perempuan semakin mengarah pada demokratisasi media dalam konteks relasi gender.

Kata kunci: aktivisme media, hegemoni, resistansi, jurnalis perempuan

Pandangan umum tentang posisi dan peran jurnalis perempuan, berikut implikasinya, lazim menempatkan perempuan sebagai objek dalam kerja jurnalistik serta representasinya dalam struktur organisasi media. Fokus utama pandangan itu adalah dominasi kultur patriarki, baik yang hidup dan menyelimuti proses kerja internal organisasi media maupun yang direproduksi dalam masyarakat yang dilayani oleh media. Sebagai institusi bisnis, media umumnya juga enggan keluar dari nilai-nilai dominan yang berkembang kemudian sebagai penganjur masyarakat untuk mengonsumsi media. Sebagian besar produk media pun melulu diarahkan untuk melayani nilai-nilai patriarkis. Bahkan, tanpa disadari media cenderung membiarkan dan melembagakan ketidaksetaraan relasi gender (*subordination*), menganggap yang satu sebagai pusat dan sebagian lagi sebagai yang lain (*the others*), yang mendorong media menyerap patriarki sebagai sebuah unit nilai yang secara komersial menguntungkan media bersangkutan.

Kecenderungan media menginstitutionalisasi perspektif patriarki dapat dilacak dari rendahnya tingkat partisipasi dan peran perempuan dalam institusi media. *Entry barrier* yang senantiasa dijumpai dalam masyarakat secara tidak langsung berdampak pada lemahnya keinginan perempuan untuk bekerja sebagai jurnalis. Keadaan tersebut kian diperparah oleh pelbagai upaya mereduksi peran jurnalis perempuan dalam mekanisme internal kerja organisasi media. Selain termarginalisasi dalam jumlah, jurnalis perempuan juga menyandang posisi terpinggirkan secara ideologis. Dengan kata lain, partisipasi dan peran jurnalis perempuan tidak hanya mengalami “penghapusan sejarah” (*historic annihilation*), melainkan juga penghapusan secara simbolik keberadaan mereka dalam representasi media (*symbolic annihilation*).

Pandangan-pandangan tersebut sangat dominan dalam studi gender dan media yang tidak menyediakan ruang gerak cukup lapang bagi kemungkinan dinamisasi internal, aktivisme, dan praktik-praktik alternatif bagi jurnalis perem-

puan. Karena itu, dibutuhkan upaya menginisiasi riset mengenai sisi lain praktik jurnalistik kaum perempuan yang berusaha mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, baik yang terkait langsung dengan kesadaran individual dan praksis di tempat kerja maupun respons jurnalis perempuan terhadap budaya patriarki. Di samping itu, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan juga dapat menempatkan diri sebagai aktor yang bisa berinisiatif melakukan perubahan dalam institusi media terkait persoalan gender. Kecenderungan tersebut bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk aktivisme atau praktik sosial (*social practices*) dalam lingkungan media.

Beberapa Teori

Aktivisme media (*media activism*) sesungguhnya terkait erat dengan usaha-usaha membangun demokratisasi media (*media democratization*), yang diawali dengan usaha-usaha reformasi media (*media reform*).¹ Ini merujuk pada usaha-usaha mengubah aspek-aspek media, yaitu struktur dan proses kerja, struktur kepegawaian, keuangan, isi, hukum media, kepemilikan media, akses terhadap media, dan lain-lain. Sejauh ini, reformasi media, di dalam banyak hal telah dilakukan melalui pemerintah dan kalangan pebisnis, yang berfokus pada kebijakan negara dalam industri komunikasi. Sementara kelompok-kelompok masyarakat sipil memusatkan perhatian pada media sebagai ruang tindakan politik. Reformasi dari masyarakat sipil

inilah yang kemudian memunculkan aktivisme media (*media activism*).²

Jurnalis adalah salah satu bagian dari lingkaran utama aktivisme yang diinisiasi oleh kalangan internal media. Aktivisme media dalam konteks relasi gender diarahkan untuk mengembangkan ruang praktik sosial yang dinamis bagi kemungkinan munculnya representasi perempuan secara lebih adil dan setara. Dengan demikian, demokratisasi institusi media diharapkan memberi ruang lebih lapang bagi jurnalis perempuan dalam hal kesetaraan kerja jurnalistik. Implikasinya, produk media menjadi lebih peka gender.

Upaya mencapai ruang media yang lebih demokratis dapat ditempuh melalui aktivisme jurnalis perempuan. Aktivisme berupa “praktik sosial” sehari-hari tersebut berbeda dengan tindakan-tindakan terstruktur yang diinisiasi oleh individu maupun bagian dari konsekuensi-konsekuensi sistemik. Konsep “praktik sosial” (*social practices*) merujuk pada pemikiran Anthony Giddens,³ salah seorang pemikir yang merumuskan teori struktur dan agensi.⁴

² Lihat, Caroll dan Hackett, “Democratic Media Activism...”, hal. 84.

³ Dua kata kunci praksis sosial, yakni “struktur” dan “agensi”, kerap menghantui banyak sosiolog yang membuat sebagian dari mereka “terjerumus” ke dalam “strukturalisme” (termasuk di dalamnya fungsionalisme) atau “intensionalisme.” Menurut Giddens, “struktur” adalah “*rules and resources*” yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem, sedangkan “agensi” adalah individu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa intervensi individu; lihat, I Wibowo, *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2000), hal. 20.

⁴ Selain Giddens, Pierre Bourdieu juga melihat bahwa pandangan yang memisahkan agen dan struktur adalah semu. Kontradiksi di antara keduanya bersifat semu, karena agen dan struktur tidak terpisah dalam praktik sosial. Lewat konsepsi hampir serupa, Bourdieu menamakan “struktur mental” untuk apa yang disebut Giddens sebagai “skemata” dan “habitus” untuk apa yang disebut Giddens sebagai “kesadaran

¹ Demokratisasi media dapat dibedakan antara demokratisasi **melalui** media—menggunakan media oleh aktor pemerintah ataupun masyarakat sipil untuk mempromosikan tujuan dan proses demokrasi di tempat lain dalam masyarakat—dan demokratisasi **pada** media itu sendiri; lihat, William K Carroll dan Robert A Hackett, “Democratic Media Activism Through the Lens of Social Movement Theory”, dalam *Media, Culture, Society* Vol. (1) 28, (London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publication, 2006), hal. 84.

Menurut Giddens, struktur dan agensi bukan dua hal yang terpisah. Struktur dan agensi seperti dua sisi mata uang yang sama. Keduanya merupakan dualitas (*duality*) serta berhubungan secara dialektis, saling memengaruhi, dan berlangsung terus-menerus tanpa henti.⁵ Struktur memengaruhi agensi dalam dua hal: memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Bahkan, dalam pengertian Giddens, struktur juga sekaligus sarana (*medium*). Bukan dualisme yang terjadi di antara struktur dan agensi, tetapi hubungan timbal balik (dualitas).⁶

Ada semacam paradoks dalam pengertian tersebut mengingat struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*)

praktis"; lihat, B Herry Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hal. 86; Berger dan Luckmann juga pernah melakukan hal serupa. Menurut Ritzer, integrasi struktur-agensi lebih merujuk pada tradisi Eropa, sedangkan tradisi Amerika lebih banyak merujuk integrasi makro-mikro. Tentang perbedaan kedua tradisi itu; lihat, George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, 5th edition (New York: Mc Graw-Hill Companies, 1996), hal. 420-425. Untuk tinjauan pemikiran Giddens dalam konteks relasi negara, media, dan masyarakat; lihat, Abdul Firman Ashaf, "Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif", dalam *Sosiohumaniora*, Vol. 8, No. 2, Juli 2006, hal. 205-218.

⁵ Teori Giddens tentang strukturasi didasarkan pada premis bahwa: "[...] *the constitution of agents and structures are not two independently given sets of phenomena, a dualism, but represent a duality...the structural properties of social systems are both medium and outcome of the practices they recursively organize...the moment of the production of action is also one of reproduction in the contexts of the day-to-day enactment of social life*". Mengutip Giddens dalam Dedy Nur Hidayat, "Jurnal, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial", dalam Dedy Nur Hidayat, *et al.*, *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 440.

⁶ Priyono, *Anthony Giddens...*, hal. 23.

praktik sosial. Dengan demikian, agensi bisa saja "meninggalkan" dan tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan ataupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada, bahkan "melawan" struktur yang selalu berusaha mengontrol (*dialectic of control*). Karena itu, pusat perhatian Giddens bukan pada struktur dan agensi, melainkan *social practices*. Dia membedakan tiga dimensi internal pelaku dalam kaitan dengan praktik sosial, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*).

Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan seseorang, namun bukan tindakan itu sendiri.⁷ Sementara kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas dalam merefleksikan dan memberi penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan yang bersangkutan. Dengan kata lain, ada sejumlah alasan bagi semua tindakan. Sedangkan kesadaran praktis merujuk pada gugus pengetahuan yang tidak selalu bisa diurai. Dalam pandangan fenomenologi, ranah pribadi berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*) itu merupakan sumber rasa aman ontologis (*ontological security*).⁸

Kesadaran praktis, sejalan dengan tesis Peter L Berger tentang *eksternalisasi*, merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial perlahan-lahan berubah menjadi struktur. Pada bagian lain yang juga berlangsung secara dialektis adalah bagaimana struktur mengekang atau memampukan tindakan atau praktik sosial. Berger menyebut proses itu sebagai *internalisasi*.⁹

⁷ Priyono, *Anthony Giddens...*, hal. 28.

⁸ Priyono, *Anthony Giddens...*, hal. 29.

⁹ Gagasan Giddens mirip dengan pemikiran Peter L Berger. Menurut Berger, terjadi proses dialektis antara struktur dan individu dalam tiga momen, yaitu objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Giddens menyebut proses dialektis itu sebagai hubungan timbal-balik yang terjadi

Internalisasi mengisyaratkan diserapnya kesadaran dan praktik sosial melalui proses interaksi sehari-hari. Struktur itu sendiri kemudian menjelma dalam kesadaran pelaku sosial, sehingga yang terjadi dalam setiap proses interaksi adalah reproduksi struktur sosial. Dalam pemahaman itu, reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan oleh pelaku. Pertanyaannya, apakah yang terjadi hanya reproduksi sosial tanpa perubahan?

Menurut Giddens, perubahan selalu terlibat dalam setiap proses strukturasi, betapapun kecilnya perubahan itu. Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangat tipis tidak seperti jarak antara kesadaran diskursif dengan motivasi tak sadar yang sedemikian jauh. Dengan meminjam gagasan interaksionisme simbolik Erving Goffman¹⁰, Giddens mengajukan argumen bahwa kita sebagai pelaku punya kemampuan untuk melakukan introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*). Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) itu meluas hingga menjadi "derutinisasi." Derutinisasi menyangkut gejala bahwa skemata yang selama ini menjadi aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) tindakan serta praktik sosial tidak lagi memadai untuk

digunakan sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial yang baru. Apa yang kemudian terjadi adalah keusangan (*obsoleteness*) struktur. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang.¹¹

Lantas bagaimana menempatkan konsep praktik sosial, sebagaimana dimaksud Giddens, dalam konteks kajian media? Menurut Norman Fairclough,¹² salah seorang teoretikus kajian media yang koheren dengan asumsi-asumsi Giddens, setidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami untuk mencerna wacana pemberitaan media massa. Bila kita ingin memahami teks (*text*), kita juga harus mempertimbangkan bagaimana praktik sosial budaya (*social cultural practice*) memengaruhi teks. Kategorisasi teks berkelindan sedemikian rupa dengan budaya patriarki yang menyelimuti proses produksi teks. Bagaimana praktik-praktik sosial budaya mengalami internalisasi dan kemudian mewujudkan dalam teks? Fairclough menempatkan elemen penting yang disebutnya praktik wacana (*discourse practice*). Itu merupakan unit dinamis yang memunculkan hegemoni ataupun resistansi dalam praksis sosial di dunia institusi media. Posisi kesadaran jurnalis perempuan terentang mulai dari kesadaran terhegemoni di satu sisi hingga resistansi yang mengarah pada aktivisme di sisi lain. Keadaan tersebut beroperasi dalam sejumlah aras, baik individual dan organisasional maupun kontekstualisasi budaya patriarki.

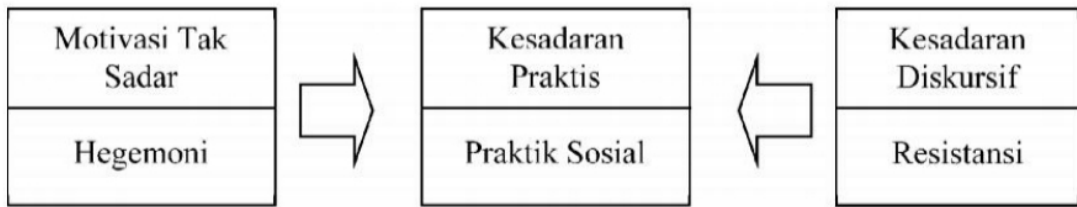
Praktik sosial jurnalis perempuan beroperasi secara dinamis. Formulasi Giddens perihal unit-unit praktik sosial memang memberi ruang cukup lapang bagi perspektif kritis yang berguna untuk memotret aktivisme perempuan. Sementara itu, jika mengacu pada terminologi

dalam praktik sosial antara struktur dan agensi, atau dualitas (*duality*). Tentang dialektika dalam pembentukan realitas yang melibatkan modus objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi; lihat, Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, terjemahan Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990) dan Peter L Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, terjemahan Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994).

¹⁰ Goffman dikenal sebagai penggagas utama pandangan dramaturgis yang sebagian besar bangunan teoretisnya merupakan sintesis dari interaksionisme simbolik, fenomenologis Schutzian, formalisme Semmelian, analisis semiotik, dan bahkan fungsionalisme Durkheimian; lihat, Dennis Brissett dan Charles Edgley (*eds.*), *Life is Theater*, edisi kedua (New York: Aldine de Gruiter, 1990), hal. 38, 44.

¹¹ Lihat, Priyono, *Anthony Giddens...*, hal. 30-33.

¹² Lihat, Norman Fairclough, *Media Discourse* (London: Edward Arnold, 1995), hal. 57-62.



Gramscian¹³, motivasi tak sadar merepresentasikan internalisasi relasi hegemonik dalam hubungan sosial, sedangkan kesadaran diskursif merupakan upaya yang secara sadar dilakukan oleh individu untuk menjaga jarak, mengevaluasi, dan memeriksa kemampuan struktur untuk mawadahi praktik sosial mereka sembari membangun strategi-strategi resistansi jika struktur dipandang telah mengalami keusangan.

Pola relasi semacam itu juga bisa merujuk pada konseptualisasi Stuart Hall tentang dominasi, negosiasi, dan oposisi.¹⁴ Konsep-konsep tersebut lazim digunakan dalam riset khalayak, namun juga sangat bermanfaat untuk melihat respons komunikator. Penulis di sini lebih mengedepankan konsep hegemoni ketimbang dominasi. Berbeda dengan dominasi yang lebih determinatif dan linier, hegemoni menuntut kerelaan dan kepatuhan dari pihak yang terhegemoni. Sementara pengertian oposisi dan resistansi dianggap bersifat identik, “negosiasi” mawujud dalam ketegangan antara keadaan hegemonik dan resistansi dalam praktik sosial. Kesadaran praktis yang condong pada motif tak sadar dikategorikan sebagai terhegemoni, sedangkan yang condong pada kesadaran diskursif masuk dalam kategori pengembangan resistansi. Namun, persoalan praktik sosial sebe-

narnya bukan berada di wilayah hegemoni ataupun resistansi; ketegangan itu dialami oleh para pelaku sosial di wilayah kesadaran praktis.

Jurnal Perempuan

Data dalam penelitian yang berlangsung sejak Juli 2008 hingga Mei 2009 ini diperoleh melalui serangkaian wawancara terhadap 16 orang jurnalis perempuan yang bekerja di beberapa surat kabar harian di Provinsi Lampung (lihat, Tabel 1). Difokuskan pada institusi media cetak karena media elektronik, terutama radio, lebih menekankan unsur hiburan ketimbang informasi. Sebagian besar radio di Provinsi Lampung bertumpu pada musik dan hiburan lain sebagai program-program andalan. Beberapa informasi yang disiarkan media elektronik radio umumnya menduplikasi berita yang telah disajikan media cetak ataupun media dalam jaringan (daring, *online*). Hal serupa juga terjadi pada media elektronik televisi lokal, baik milik swasta maupun pemerintah.¹⁵

Berdasarkan konfigurasi konseptual hegemoni-resistansi, dapat dibagi sejumlah area yang menunjukkan wilayah di mana dan bagaimana karakteristik praktik sosial dilakukan oleh jurnalis perempuan.

Terhegemoni dalam Rentang Aras Individual, Organisasional, hingga Kontekstual

Kondisi ini merupakan totalitas pervasif pandangan-pandangan patriarki yang, baik se-

¹³ Lihat, Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist, 1999); juga Abdul Firman Ashaf, “Media dan Kekuasaan dalam Masyarakat: Studi Media dalam Tinjauan Perspektif “Hegemoni” Gramsci”, dalam *Sosiologi, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, September 2001.

¹⁴ Lihat, Stuart Hall, “Encoding/Decoding”, dalam Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe, dan Paul Willis (eds.), *Culture, Media, Language* (London: Hutchinson, 1986).

¹⁵ Terima kasih kepada saudari Yulia Eliza yang membantu penulis dalam proses pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa jurnalis perempuan.

Tabel. 1. Jumlah Informan

No	Nama Surat Kabar Harian (SKH)	Jurnalis Perempuan
1	Lampung Post	10
2	Radar Lampung	4
3	Rakyat Lampung	2
Jumlah		16

cara sadar maupun tidak, diinternalisasi jurnalis perempuan ketika menjadi bagian dari struktur keluarga atau masyarakat. Pandangan tersebut membuat mereka menoleransi atau tidak melawan pola relasi yang sesungguhnya tidak seimbang. Semua itu dianggap sebagai hal yang wajar dan normal. Mereka sulit keluar dari pola pikir patriarkis yang tertanam sejak dalam struktur rumah tangga atau hubungan suami-istri. Hal tersebut bisa disimak dari bagaimana jurnalis perempuan merunut keterkaitan antara ranah domestik dan ranah publik, serta bagaimana masyarakat dan nilai-nilai dominan menjadi konteks praksis tersebut:

Kalau dari keluarga saya tidak pernah mengeluhkan pekerjaan saya ini, tapi kalau suami saya masih suka mengeluhkan, karena menurut dia pekerjaan ini hampir tidak mengenal waktu, dia takut anak saya tidak bisa mendapat waktu yang total. Paling sekarang saya suka sebelum magrib sudah sampai rumah dan tidak lagi menghabiskan banyak waktu di kantor selain setor berita dan ada hal penting lain.¹⁶

Jurnalis lainnya menyatakan:

Kerja di media cetak *tuh* jam-nya lebih banyak dari jam biasa. Kalau jadi wartawan itu 24 jam lebih. *Gak* mau laki-lakinya. Suami kita, misalnya, di rumah, kita tinggal-tinggal liputan. Mana mau dia *ngurus* anak. Mana mau masyarakat kita [menerima itu]. Karena itu, kita, kaum perempuan, terpaksa harus memi-

lih. Ya... itulah siklus kehidupan, *gak* mungkin kita *mikiran* pekerjaan terus.¹⁷

Keadaan tersebut boleh jadi merupakan hasil dari proses historis cukup panjang tempat semesta pemaknaan (*universe of meaning*) masyarakat sarat oleh struktur pemahaman patriarkis tentang fungsi perempuan dalam ru-

mah tangga dan masyarakat. Individu jurnalis perempuan tampak mengalami kesulitan melepaskan diri dari semesta pemaknaan seperti itu. Pada tahap ini, struktur kognisi yang berkait kelindan dengan struktur sosial mendeterminasi cara pandang laki-laki maupun perempuan terhadap posisi sosial perempuan. Cara pandang dan perilaku patriarkis pun menjadi sesuatu yang dianggap normal dan wajar. Upaya untuk mendelegitimasi kerap dianggap sebagai bentuk tindakan menyimpang dan subversif.

Dalam struktur organisasi media, kebiasaan dan keadaan yang tercipta juga menggiring perempuan dalam posisi subordinat. Margaret Andersen¹⁸, misalnya, menyimpulkan bahwa perempuan umumnya tidak memiliki kesempatan untuk menduduki *top executive* atau penentu kebijakan (*decision maker*). Sebaliknya kaum laki-laki umumnya memegang kendali posisi-posisi strategis dalam organisasi media. Para jurnalis perempuan terpaksa atau dipaksa menerima praktik dan nilai-nilai yang tanpa disadari mendukung superioritas dan dominasi laki-laki. Implikasinya, menurut Park Yong-Sang¹⁹, banyak peliputan media menjadi bias gender dan melanggengkan nilai-nilai tradisional

¹⁷ Wawancara dengan informan ke-3, tanggal 1 Juli 2008 dan 16 Februari 2009.

¹⁸ Lihat, Margaret L Andersen, *Women: Sociological and Feminist Perspectives* (New York: Mac Millan Publishing, 1983), hal. 222.

¹⁹ Lihat, Park Yong-Sang, "Women in the Mass Media", dalam *Media Development*, No.5, 1987, hal. 229.

¹⁶ Wawancara dengan informan ke-12, tanggal 13 Juli 2008 dan 4 Mei 2009.

tentang *sex role*. Apa yang dilakukan jurnalis perempuan pada titik itu? Menurut Carol Tavris, “Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan laki-laki. Seringkali mereka harus *measure up* atau memenuhi standar norma yang dibuat kaum laki-laki. Bila pas, mereka disebut “normal.” Bila tidak, mereka dianggap “sakit” atau “tidak normal.” Malangnya, standar tersebut seringkali berubah-ubah”.²⁰

Pengertian *sex/gender* pada dasarnya mengandung tiga implikasi yang saling mengait: konstruksi sosial tentang kategori gender berbasis perbedaan biologis/jenis kelamin (*sex*), pembagian kerja secara seksual (*sexual division of labour*), dan regulasi sosial tentang seksualitas dengan norma positif dan negatif. Permasalahannya, bagaimana “sistem” *sex/gender* tersebut bisa berubah menjadi sebuah stratifikasi sosial. Hal itu bermula dari munculnya pandangan patriarkis atau segala sesuatu yang menempatkan laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan dan secara oposisioner segala hal yang berhubungan dengan maskulinitas dianggap lebih bernilai ketimbang feminitas.

Di sisi lain, para feminis meyakini bahwa superioritas laki-laki dan cara pandang terhadap perempuan yang disosialisasikan secara turun-temurun sudah menjadi semacam mitos yang telah berakar kuat dalam masyarakat. “Dunia” perempuan sering dikontraskan dengan “dunia” lelaki, meski perempuan tak pernah mempunyai sebuah dunia tersendiri yang tertutup. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang dikuasai laki-laki dan mereka menempati kedudukan lebih rendah. Kaum perempuan sendiri mengakui, baik langsung maupun tidak, bahwa pada dasarnya dunia ini milik kaum lelaki—ia dibentuk, diberi ciri maskulin, dikuasai, dan didominasi kaum lelaki. Karena sudah

terbiasa menerima otoritas kaum lelaki, maka bukan tugas kaum perempuan untuk melihat keadaan dirinya sendiri. Perempuan telah terbiasamemberi kepercayaan kepada laki-laki. Dunia dan hidup perempuan senantiasa diinterpretasikan melalui mata dan persepsi lelaki; istri harus selalu mendukung dan berdiri dibelakang suami.²¹

Terhegemoni pada Aras Individual, Namun Melakukan Resistansi pada Aras Organisasional

Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka yang tidak memiliki kesadaran gender mampu melakukan resistansi pada aras organisasional? Mungkinkah jurnalis perempuan yang terhegemoni pada aras individual, tidak melakukan afirmasi berdasarkan prinsip-prinsip umum feminisme dan menerima gagasan dasar patriarki tentang keutamaan laki-laki, dapat melakukan resistansi pada aras organisasional? Bisa saja, karena sumber praksis sosial resistansi tidak semata diperoleh dari pandangan para feminis. Para jurnalis sangat sedikit mengonsumsi literatur feminis, tetapi mereka memiliki sumber lain, yakni Islam yang menjadi *world view* sekaligus basis tindakan. Dengan kata lain, Islam tidak semata diajukan sebagai retorika ideologi tandingan, melainkan juga menjadi basis praktik sosial. Pandangan tersebut sangat mungkin dimiliki oleh seorang jurnalis perempuan dengan agama yang berbeda.

Dalam pandangan Giddens, individu sesungguhnya punya pilihan untuk meninggalkan struktur yang dianggap telah usang karena tidak mampu mewartakan praktik sosialnya.²² Gambaran yang kompleks berikut prasangka terhadap feminis dan feminisme membuat individu jurnalis memilih struktur lain yang dianggapnya lebih koheren dengan sistem nilai yang dimilikinya. Misalnya, feminisme diberi atribut

²⁰ Carol Tavris, *Mismeasure of Woman* (New York: Simon and Schuster, 1992) dalam Jalaluddin Rakhmat, “Dari Psikologi Androsentris ke Psikologi Feminis: Membongkar Mitos-mitos tentang Perempuan”, dalam *Ullumul Qur’an*, Vol. 5, No. 5 dan 6, 1994, hal. 17.

²¹ Lihat, Julia I Suryakusuma, “Wanita dalam Mitos, Realitas dan Emansipasi” *Prisma*, (No. 7, 1981), hal. 7.

²² Priyono, *Anthony Giddens...*, hal.30-31.

liberal dan kebarat-baratan. Sebagian malah menganggap sistem nilai feminisme sangat bertentangan dengan Islam. Islam disini tidak mesti merujuk pada Islam sebagai pranata, namun Islam dalam pengertian yang telah didefinisikan oleh para jurnalis perempuan.

Pada aras empirik, pengejawantahan sikap resistansi sangat mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang mungkin dilakukan oleh para feminis. Misalnya, jurnalis perempuan meyakini bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadikan media simbolik bukan sebagai medium penyebaran pornografi yang berpotensi melawan kepentingan kaum perempuan. Agama sangat berkepentingan dengan soal perlindungan terhadap perempuan. Hal tersebut terjadi karena ada keyakinan bahwa perempuan sangat rentan terhadap kejahatan pornografi:

Konsep gender itu akan hidup dan bisa diterima kalau tidak bertentangan nilai. Nilai siapa? Agama masing-masinglah. Kalau nilai apapun, di luar agama itu nilainya sangat relatif. Akan tetapi, nilai agama *kan* sifatnya konstan. *Nah*, karena saya orang Islam, standar saya adalah nilai Islam. Nilai Al-Quran dan hadist! Saya setuju dengan RUU APP [RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, *pen*] karena ia akan membuat perempuan tidak menjadi korban. Sasaran RUU APP sebenarnya adalah media massa untuk membatasi dan bahkan melarang menyebarkan foto perempuan telanjang.²³

Argumen tersebut dikemukakan oleh informan yang tidak puas terhadap gerakan perempuan yang semata melakukan advokasi terhadap korban perkosaan. Menurutnya, gerakan perempuan seharusnya mencegah, membatasi, dan menutup ruang-ruang yang membuat perempuan menjadi korban perkosaan.

Terhegemoni pada Aras Individual, Resistansi pada Aras Kontekstual

Posisi ini tentu merupakan posisi yang sulit, karena struktur kesadaran bermula pada aras

individual. Namun, adanya struktur pemahaman dan *world view* lain (baca: agama Islam) yang diinternalisasi secara individual membuat para jurnalis perempuan pada akhirnya membangun dikotomi antara feminisme dan Islam. Hal itu karena kesadaran menjadi “perempuan muslim” membuat mereka menyerap identitas sebagai perempuan dan sekaligus muslim. Kesadaran itulah yang membuat mereka menjadikan Islam bersaing dengan “ideologi” lain sebagai pilihan aktivisme. Sekalipun telah tersedia formulasi dan pandangan feminisme untuk memahami individu dan relasi gender, hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka absah dan serampangan menjadi objek perspektif feminisme. Bahkan, sebagian di antara mereka meyakini bahwa Islam pada aras makro serba meliputi dan mengatur segalanya, termasuk perihal gender. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian jurnalis perempuan memperlakukan Islam sebagai “sumber ideologi.” Dengan kata lain, jurnalis perempuan mengafirmasi secara positif peran domestik sekaligus menafsirkan peran progresif mereka di wilayah publik.

Posisi tersebut secara tidak langsung menegaskan penolakan terhadap feminisme, setidaknya “feminisme sekuler” sebagaimana ditafsirkan oleh para jurnalis perempuan. Pandangan itu menyiratkan feminisme memiliki batas wilayah sangat tegas bahwa secara tradisional perempuan berada di wilayah domestik sedangkan laki-laki di wilayah publik. Pembagian “wilayah” itulah yang membuat perempuan senantiasa berada dalam posisi tidak menguntungkan, baik dalam tataran historis maupun simbolik. Karena wilayah publik dikuasai laki-laki, maka diskursus kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, akan selalu menggunakan perspektif laki-laki. Dunia menjadi terlihat dalam definisi laki-laki. Dunia sangat bias kepentingan laki-laki.

Hal tersebut berbeda dengan pandangan sebagian jurnalis perempuan yang menafsirkan bahwa Islam memberi kerangka integrasi yang jelas antara wilayah domestik dan publik. Berkerja sebagai jurnalis di satu sisi adalah ke-

²³ Wawancara dengan informan ke-2, tanggal 9 Agustus 2008 dan 21 Maret 2009.

nyataan bahwa itu merupakan aktivitas di wilayah publik, namun di sisi lain mereka sangat menghargai segala aktivitas di wilayah domestik:

Relasi yang sehat dalam rumah tangga mesti didasari oleh kesepakatan, komitmen, dan kesadaran. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga, sedangkan perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam pengertian teknis manajerial. Pada akhirnya, konteks peran ganda mesti disadari perempuan sebagai suatu kodrat.²⁴

Jurnal lainya mengatakan:

Perempuan dan laki-laki, itu sudah punya tanggung jawab masing-masing, kewajiban masing-masing. Perempuan itu kodratnya apa? Melahirkan. Laki-laki kodratnya apa? Kita *kan* diciptakan berbeda itu untuk saling mengisi. Jadi, tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang *underestimate*. Saya tetap *respect* sama suami saya. Saya tetap hormat. Itu ibadah!²⁵

Hal tersebut menghasilkan implikasi berbeda. Partisipasi perempuan di wilayah publik tampak menjadi lebih terbatas ketimbang laki-laki mengingat “peran ganda” yang mesti disandang kaum perempuan. Menurut kategori feminis, praksis tersebut dapat diberi makna terhegemoni di tingkat individual. Namun demikian, sebagian jurnal perempuan telah mengadopsi gagasan mengenai integrasi wilayah domestik dan publik menjadi struktur pemahaman baru dalam membangun *world view* bagi basis aktivitas mereka.

Resistensi pada Aras Individual, Terhegemoni pada Aras Organisasional

Ada sejumlah pernyataan yang secara umum menggambarkan kondisi tersebut. Beberapa di antaranya mengindikasikan bahwa tekanan organisasional dan relasional mesti di-

terima dengan “pahit” oleh jurnal perempuan. Salah seorang jurnal mengatakan:

Jaringan media kami ini (gajinya) lebih *gede*, tapi kerjanya lebih keras. Kejam. Kapitalis. Kata bos, ini koran bisnis. *Frame*-nya bisnis. Susah kalau hanya mengandalkan dari penjualan koran *aja*. Hanya cukup untuk (biaya) cetak. Sementara untuk karyawan darimana? Daripada *nerima* dari narasumber, *mending* dari iklan. Halal!²⁶

Salah satu penelitian tentang media olahraga juga menggambarkan secara khas tekanan organisasional terhadap jurnal perempuan. Divisi olahraga dalam sebuah institusi media pada dasarnya lebih toleran dan “bersahabat”, namun perempuan yang bekerja dan meniti jenjang karier di sebuah media olahraga akan merasakan lingkungannya penuh berwajah patriarkis. Bahkan, beberapa di antara jurnal perempuan mengadopsi nilai-nilai patriarkis yang justru semakin memarginalkan status mereka dan tidak bisa memfasilitasi perubahan peliputan olahraga bagi perempuan yang terpinggirkan.²⁷

Bisnis media adalah *male dominated route*, karena selalu mencari keuntungan. Sementara *female dominated route* adalah kesejahteraan.²⁸ Kondisi demikian diperparah oleh marginalisasi pandangan-pandangan perempuan dalam membangun budaya organisasi media. Jika perempuan tidak berada dalam posisi kuasa, tempat gagasan dan citra diproduksi, maka pengalaman

²⁶ Wawancara dengan informan ke-4, tanggal 9 Juli 2008 dan 18 April 2009.

²⁷ Lihat, Marie Hardin dan Stacie Shain, “Strength in Numbers? The Experience and Attitudes of Woman in Sports Media Careers”, dalam *Journalism and Mass Communication Quarterly*, Vol. 82, No. 4, 2005.

²⁸ *Corporate culture* media yang didominasi *male route* semata mengejar keuntungan mesti diseimbangkan oleh *female route* dengan memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan selalu bersifat *female*. Lihat, wawancara *Jurnal Perempuan* dengan salah seorang jurnal perempuan, Maria Hartiningsih, dalam *Jurnal Perempuan*, No. 28, 2004, hal. 87-88.

²⁴ Wawancara dengan informan ke-2, tanggal 2 Agustus 2008 dan 21 Maret 2009.

²⁵ Wawancara dengan informan ke-16, tanggal 11 Juli 2008 dan 6 Mei 2009.

dan pandangan dunianya tidak akan terefleksi dalam pembentukan ide-ide organisasi. Siapa pun yang berkuasa pasti memberikan pandangan tentang dunia dan ide yang dihasilkan merupakan refleksi dari nilai-nilai elite yang berkuasa.²⁹ Yang muncul kemudian adalah sebuah ironi; perempuan tersubordinasi tetapi turut melestarikan nilai-nilai seksis di media. Dengan kata lain, seksisme dan *world view* lelaki bukan hanya diterima oleh laki-laki, melainkan juga telah terinternalisasi ke dalam kesadaran perempuan.³⁰

Bagaimanapun juga, faktor paling penting adalah potensi perubahan datang dari kesadaran para jurnalis. Pada titik tertentu, jurnalis perempuan menyadari bahwa tekanan serta relasi yang berlangsung selama itu tampak tidak adil. Dapat dikatakan, meminjam diksi Giddens, jurnalis perempuan seperti itu umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*) serta menjaga jarak dan tidak mudah “tercelup” ke dalam hiruk-pikuk praktik sosial yang “mengasingkan” perempuan. Kondisi tersebut memungkinkan jurnalis perempuan membangun dan mengembangkan aksi serta membuka ruang lebih luas bagi perubahan. Proses menuju perubahan mensyaratkan kondisi tertentu, termasuk penguatan kesadaran gender yang dimiliki jurnalis perempuan. Itu penting untuk membangun diskursus serta menetapkan dan memengaruhi institusi tempat mereka bekerja. Secara individual kesadaran tersebut tampak sangat kuat

Hati saya menggebu-gebu, saat menulis tentang kasus yang pernah menimpa seorang perempuan. November 2007 ada kasus *trafficking*. Saya investigasi sejak awal, dari dia diculik, ditangkap pelakunya, hingga jatuh vonis.³¹

²⁹ Andersen, *Women: Sociological and...*, hal. 220.

³⁰ Claire M Renzetti dan Daniel J Curran, *Women, Men, and Society: The Sociology of Gender* (Boston: Allyn & Bacon, 1989), hal. 114.

³¹ Wawancara dengan informan ke-4, tanggal 9 Juli 2008 dan 18 April 2009.

Sementara jurnalis lainnya mengatakan:

Ini dimulai dari cara kita memosisikan perempuan. Perempuan itu *kan* makhluk Tuhan juga. Jadi, di mata Tuhan adalah sama dengan pria. Misalnya, kadang ada berita perkosaan yang dibidang bukan diperkosa. Saya langsung bilang, “*ak* boleh seperti itu *dong*.” Faktanya, memang ada pelecehan seksual. Kasus perkosaan itu hanya karena lelakinya tidak mau bertanggung jawab, akhirnya dimuat. Apa pun namanya, memang harus agak pro sedikitlah.³²

Resistensi dalam Rentang Aras Individual, Organisasional, hingga Kontekstual

Kekayaan utama para jurnalis perempuan, sebagai hasil dari perjumpaan terus menerus dengan fakta-fakta sosial, adalah mereka mampu membangun pemahaman komprehensif perihal bagaimana kekuasaan beroperasi dalam relasi-relasi sosial. Pada tahap ini, jurnalis perempuan telah mampu membangun kesadaran perihal kesetaraan antar-gender, mengembangkan relasi yang adil pada aras organisasi, serta mendelegitimasi ideologi patriarki.

Pengembangan kesadaran akan kesetaraan gender dicirikan oleh pemahaman yang baik tentang posisi dan identitas dalam relasi laki-laki dan perempuan. Mengembangkan relasi yang adil dan setara dalam organisasi dicirikan oleh afirmasi atas sejumlah praktik yang turut memperkuat identitas gender (perempuan) serta usaha mendorong perubahan praktik-praktik organisasional yang mendiskriminasi dan menyubordinasi perempuan. Mendelegitimasi ideologi patriarki pada aras kontekstual dilakukan dengan menolak mereproduksi patriarki dengan memformulasi isi pesan media yang menguatkan peran perempuan.³³

³² Wawancara dengan informan ke-1, tanggal 30 Juni 2008 dan 7 Maret 2009.

³³ Secara individual kesadaran gender dan penolakan terhadap tafsir patriarki atas kesetaraan gender memperoleh porsi yang memadai. “Feminisme itu memperjuangkan hak-hak kesamaan perolehan, kesamaan kesempatan bagi pem-

Aktivisme juga menyentuh kerjasama dengan entitas lain dalam masyarakat. Hal ini dipandang perlu bagi penguatan diskursus perempuan dalam masyarakat dan media. Jurnalis perempuan mengonfirmasi pelibatan perempuan sebagai sumber berita dengan memberi ruang lebih luas untuk berbagi pengalaman sesama perempuan.

Kadang-kadang kita juga mengundang kalangan perempuan untuk ikut diskusi bersama. Hasil diskusi itu kemudian dimuat, terutama tema-tema berkaitan dengan perempuan yang melibatkan pakar atau narasumber perempuan.³⁴

Pendek kata, kegiatan membangun jaringan gerakan perempuan dalam masyarakat sipil pada gilirannya ikut membangun diskursus bagi penguatan perempuan dan media itu sendiri.

Kita juga membangun jaringan, kerja sama dengan pihak lain, memfasilitasi kalau ada pihak lain yang mau bekerja sama dengan media kita. Dosen-dosen atau aktivis perempuan itu secara rutin *ngasih* tulisan-tulisan opini dan kita beri ruangan untuk itu.³⁵

Semua respons tersebut sesungguhnya berangkat dari kesadaran jurnalis perempuan. Sebuah studi, misalnya, menyimpulkan bahwa sebagian jurnalis perempuan sepakat untuk memiliki lebih banyak kebebasan dan berjuang untuk persamaan gender. Mereka cenderung menolak patriarki yang menempatkan mereka dalam peran domestik. Mereka tidak ingin dianggap sebagai objek seks laki-laki.³⁶ Studi lain yang

puan. Itu mungkin tidak bisa dimungkiri, karena bisa dikatakan bahwa yang dibawa feminisme adalah juga memperjuangkan hak-hak untuk mendapatkan kesempatan bagi perempuan itu sendiri"; Wawancara dengan informan ke-14, tanggal 9 Agustus 2008 dan 1 Mei 2009.

³⁴ Wawancara dengan informan ke-1, tanggal 30 Juni 2008 dan 7 Maret 2009.

³⁵ Wawancara dengan informan ke-14, tanggal 9 Agustus 2008 dan 1 Mei 2009.

³⁶ Lihat, Marjuni Rangkuti, *et al.*, "Pelibatan Wanita dalam Organisasi Media Cetak di Sumatera

berkaitan dengan organisasi dan kerja jurnalistik menunjukkan beberapa jurnalis perempuan merasakan adanya kesenjangan antara kontrol dan otonomi sebagai jurnalis. Mereka merasa lebih memiliki kontrol dalam peran mereka sebagai jurnalis dewasa ini. Namun, sebagian jurnalis perempuan yang menilai sedikitnya kontrol dalam kerja mereka selama ini mengekspresikannya dengan cara tidak menyenangkan. Karena itu, jurnalis perempuan menginginkan kemandirian (*autonomy*) dalam bekerja dan kepuasan dari kemandirian tersebut. Di kalangan jurnalis perempuan, kontrol dan otonomi muncul sebagai tema bersama.³⁷ Itulah aktivisme yang dilakukan jurnalis perempuan bagi kesetaraan dan demokratisasi dalam dunia media.

Penutup

Karakter dominan yang muncul dari kajian tentang jurnalis perempuan, antara lain, berkait dengan rendahnya partisipasi perempuan di institusi media, pola hubungan yang diskriminatif, lingkungan yang patriarkis, rendahnya kesadaran gender, serta kerja jurnalistik yang tidak sensitif gender. Namun, ada beberapa fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya terdapat jurnalis yang sadar sepenuhnya kondisi tersebut, dan mengidentifikasi kebutuhan mendasar apa yang seharusnya dipenuhi dalam kerja-kerja media.

Praxis yang terlembagakan dalam institusi media memang berakar kuat pada budaya patriarki dan kesadaran individual jurnalis perempuan. Dalam rentang aras kesadaran individual, organisasional, dan kontekstualisasi budaya patriarki, praxis jurnalis perempuan beroperasi

Utara" dalam <http://www.menegpp.go/menegpp.php?cat=list&id=jurnal> (diakses 8 April 2007).

³⁷ Lihat, Cindy Elmore, "Woman Journalists Who Quit and Tell: the Elusive Search for Control", Makalah dipresentasikan pada the Association for Education in Journalism and Mass Communication, San Antonio, Texas, Amerika Serikat, Agustus 2005.

secara dinamis dan cair. Ibarat sebuah kesinambungan, jurnalis perempuan terjebak dan sekaligus mereproduksi kecenderungan nilai patriarkis yang hegemonik. Namun, di sisi lain, mereka melakukan resistansi dengan menginisiasi kerja media yang mendukung dan memberi ruang lebih luas bagi demokratisasi media berbasis gender. Dalam konteks aktivisme media, apa yang dilakukan oleh jurnalis perempuan bertujuan untuk memengaruhi

praktik dan isi media *mainstream* dengan membuka “suara-suara oposisi” secara internal dalam institusi media bersangkutan serta melakukan *monitoring* seberapa jauh media secara struktural membuka ruang bagi inisiasi perempuan sekaligus melakukan kampanye untuk mengubah aspek-aspek tertentu dari representasi yang secara simbolik merugikan perempuan. •

Abdul Firman Ashaf

